

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SERTA
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Annisa Fitriani

No. Mahasiswa : 20312191

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SERTA KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Annisa Fitriani

No. Mahasiswa: 20312191

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 22 Oktober 2023

Penulis,



(Anissa Fitriani)

LEMBAR PENGESAHAN

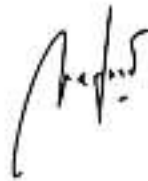
PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SERTA
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Annisa Fitriani
No.Mahasiswa: 20312191

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal, 22 Oktober 2023
Dosen Pembimbing,



(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.)

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangun

Disusun oleh : ANNISA FITRIANI

Nomor Mahasiswa : 20312191

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Selasa, 12 Desember 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Penguji : Arif Rahman, SE., SUP., M.Com., Ph.D



Mengetahui
Deputy Dekan Bidang Bisnis dan Ekonomika



John Arif, Ph.D., CFA, CFP(S)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Deputy Prof. Dr. Asep Harkatiwijaya
Universitas Islam Indonesia
Lingkungan Catur Diklat Yogyakarta (L2B1)
T. 0274 851540, 851515
F. 0274 852589
E. Berita.ac.id
M. Berita.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2023/2024, hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ANNISA FITRIANI
NIM : 20312191
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
Dosen Pembimbing : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditangipkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.
Anggota Tim : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Yogyakarta, 11 December 2023

Program Studi Akuntansi,



Prof. Rifi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SA/
NIP. 033120104

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS Ar Rad 11)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” (HR Imam Syafi’i)

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.” (Bambang Pamungkas)

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK....

Diri saya sendiri yang sudah berjuang dan bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini demi melihat orang tersayang bangga.

Kedua orang tua saya abah dan mama yang sampai sekarang tidak pernah keberatan untuk memberikan doa restu, dukungan dan semangat saat masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat iman dan islam kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju jalan yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi ini dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberi kekuatan, kemudahan, kelancaran, serta ridho dan kasih sayang tiada tara pada seluruh hamba-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

3. Kedua orang tua penulis, Abah saya Ibramsyah dan Mama saya Kamsiah Bakrie yang selalu memberikan perhatian, dukungan, do'a, dan kasih sayangnya hingga nanti.
4. Ravi'i Ramadhan dan Ilham Maulana selaku kakak serta Reyhan Iswardan selaku adik penulis yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan arahnya sehingga penulis memiliki motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk yang terkasih Muhammad Albi Rusliansyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama kuliah, serta selalu menemani saat suka dan duka membuat Skripsi ini,
6. Keluarga besar Albi yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan kepada saya.
7. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026, dan seluruh jajaran pemimpin universitas.
8. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026, dan seluruh jajaran pemimpin Fakultas.
9. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
10. Bapak Dr Mahmudi S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas waktu, nasehat, kritik, saran, serta arahan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Pegawai, Staff Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan waktu untuk membekali ilmu kepada penulis selama menyelesaikan studi di bangku perkuliahan.

12. Sahabat penulis dari SMP hingga sekarang yang sudah seperti keluarga, Azizah Bansir, Ridha Aulia dan Dewi Kurnia Putri.
13. Sahabat penulis dari SMA hingga sekarang yang sudah seperti keluarga, Atiqah Nurul, Yuniza Aura dan Salsabila Rana.
14. Teman-teman dimasa awal perkuliahan hingga sekarang, Apsarini Khairunisa, Tinara Zaphira, dan Putri Intan.
15. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2020 khususnya teman-teman yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baik sejak awal penulis memasuki bangku kuliah.
16. Semua pihak yang turut serta membantu penulis di segala bidang kehidupan yang tidak dapat ditulis satu per satu.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua kebaikan, bantuan, serta dukungan dari pihak tersebut. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, dan membalas semua kebaikan kalian semua. Penulis menyadari bahwa skripsi yang sudah ditulis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap supaya skripsi ini bisa memberikan manfaat serta pengetahuan bagi banyak pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Penulis,

Annisa Fitriani

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	ivi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Telaah Kajian Terdahulu	23
2.3 Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Populasi dan Sampel	37
3.3 Pengumpulan Data	39
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	39
3.5 Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Wawancara (interview)	50
4.2 Kuesioner (google form)	52
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Implikasi	75
5.3 Keterbatasan	75
5.4 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1 Daftar SKPD Kabupaten Bulungan	38
Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	42
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4. 2 Umur	53
Tabel 4. 3 Riwayat Pendidikan	54
Tabel 4. 4 Instansi/Unit Kerja	55
Tabel 4. 5 Masa Kerja	57
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas.....	61
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas Data	62
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas	63
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedasitas	66
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	66
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	68
Tabel 4. 14 Hasil Uji Statistik F	69
Tabel 4. 15 Hasil Uji Hipotesis	69
Tabel 4. 16 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	36
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heterokedasitas.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian dan Pengambilan Data.....	82
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	83
Lampiran 3 Data Responden.....	88
Lampiran 4 Data Nilai Jawaban Responden	91
Lampiran 5 Data Demografi Responden.....	94
Lampiran 6 Hasil Statistik Deskriptif	96
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas	98
Lampiran 8 Hasil Uji Reliabilitas	100
Lampiran 9 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	101
Lampiran 10 Hasil Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis	103
Lampiran 11 Hasil Uji Determinasi	104
Lampiran 12 Hasil Uji Statistik F	105
Lampiran 13 Wawancara Informan	106

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal serta Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan survei kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 120 pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulungan yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 26.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil wawancara yang menunjukkan ketiga variable tersebut sangat mendukung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengujian hipotesis menunjukkan (1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan (3) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kualitas laporan keuangan, penerapan SKAD dan SPI, serta kompetensi sumber daya manusia

ABSTRACT

This research was conducted to determine the Influence of the Implementation of the Regional Financial Accounting System and Internal Control System, as well as Human Resource Competence, on the quality of local government financial reports. Data for this research were collected through interviews and questionnaire surveys. Questionnaires were distributed to 120 employees of the Regional Work Unit (Satuan Kerja Perangkat Daerah) of Bulungan Regency who work in the accounting/financial department. The collected data were processed using SPSS version 26.0 software. The statistical method used to test the hypotheses is multiple linear regression analysis. The interview results that strongly support these three variables in relation to the quality of local government financial reports, and hypothesis testing indicates (1) the Implementation of the Regional Financial Accounting System has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports, (2) the Implementation of the Internal Control System has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports, and (3) Human Resource Competence has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: financial report quality, SKAD and SPI implementation, and human resource competence.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara pasti mempunyai suatu pemerintah yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Salah satu nya ialah Organisasi sektor publik yaitu organisasi yang bertujuan menyediakan/memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Menurut Mahsun (2019) Area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Bahkan beberapa bidang sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal (charities). Ichsan et al (2013) menjelaskan bahwa Organisasi sektor publik yang sering dianggap identik dengan pemerintah atau lembaga yang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, kebebasan beragama, dan bidang lainnya.

Dalam organisasi sektor publik yaitu Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, patuh terhadap hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini juga harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Akan tetapi masih terdapat banyak masalah dalam pelaporan keuangan pemerintah, termasuk ketidaksesuaian data dengan peraturan dan temuan-temuan penyimpangan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Hal ini telah memicu tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*). Sebagai hasilnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merasa perlu untuk mengadopsi praktik akuntabilitas dan transparansi guna memenuhi harapan masyarakat (Desiana, 2014).

Sebagai cara untuk menjalankan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah konkret dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah dengan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mematuhi prinsip-prinsip ketepatan waktu dan harus dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Setelah laporan keuangan pemerintah tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan tersebut juga harus disampaikan kepada DPR/DPRD serta masyarakat umum (Novita, 2013).

Oleh karena itu dalam pengertian yang lebih sederhana, Laporan keuangan merupakan catatan mengenai informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi dalam suatu periode akuntansi yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut (SAK, 2009). Adapun elemen-elemen laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja finansial sehingga diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber dana. Dengan demikian, diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki standar kualitas yang tinggi (Suwanda et al, 2020).

Menurut Mifthahul (2019) bahwa Kualitas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan perusahaan atau organisasi baik atau tidaknya. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting sebagai salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang efektif. Laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dalam pembuatan kebijakan pemerintahan di masa depan. Ketika laporan keuangan dapat memberikan panduan yang berguna dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat mendorong percepatan pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Kualitas laporan keuangan dapat dinilai berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berbagai tingkatan penilaian laporan

keuangan setelah melakukan audit. Tingkat tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian diikuti oleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Tingkat opini ini mencerminkan sejauh mana laporan keuangan dianggap memiliki kualitas yang baik.

Dalam fenomena terkait kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bulungan pada tahun 2017 yaitu meliputi anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Dana Non RKUD yaitu Dana BOS oleh satuan pendidikan/sekolah, serta Dana JKN/Kapitasi oleh Puskesmas dan BLUD menjadi temuan oleh BPK RI atas LKPD kabupaten Bulungan karena tidak menyajikan penggunaan dana Non RKUD secara Wajar. Sehingga perlunya evaluasi lagi mengenai faktor – faktor yang menyebabkan penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan peran penting karena SAKD membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan memiliki standar akuntansi yang jelas, laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum. Serta alat penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta dalam menilai kualitas laporan keuangan mereka. Hal ini sangat penting untuk memastikan dana publik digunakan dengan baik dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah (Suriyanto et al, 2022).

Peran pengawasan juga sangat diperlukan dalam menghasilkan LKPD yang baik yaitu melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Jika lemahnya SPI di lingkup pemerintahan dapat terjadi kelalaian dalam penyajian laporan keuangan daerah. Maka dari itu penerapan SPI penting, Secara keseluruhan juga SPI merupakan bagian integral dari proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan integritas dan kualitas laporan keuangan. SPI membantu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan penggunaan dana publik yang bijaksana (Mulyani & Suryawati, 2011).

Selain itu, Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mutu laporan keuangan. Ini mencakup pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, sebagai entitas pemerintahan memerlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang memadai. Khususnya, pegawai yang bertanggung jawab atas urusan keuangan di Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan untuk merancang laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Seharusnya, pemahaman tentang akuntansi adalah dasar yang esensial, karena pengetahuan dan keahlian dalam domain ini menjadi fondasi utama dalam mengelola data akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Jamaluddin et al, 2020).

Sejumlah studi telah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu di antaranya dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016), yang mempertimbangkan beberapa faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian internal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara faktor-faktor lainnya tidak memiliki dampak positif. Penelitian yang sama dilakukan oleh Indrayani & Widiastuti (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memiliki dampak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal tampaknya memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, Kompetensi Sumber Daya Manusia tampaknya memiliki efek positif dalam mengurangi dampak negatif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurillah & Muid (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif yang signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Murapi (2016), yang menunjukkan bahwa

penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tetapi tidak dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga menunjukkan inkonsisten hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk diteliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan agar mendapatkan hasil yang konsisten.

Penelitian ini merupakan duplikasi dari Indrayani & Widiastuti (2020), tetapi terdapat perbedaan dalam jenis penelitian sebelumnya, yaitu pada sebelumnya dengan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu *mix method* merupakan jenis penelitian campuran data kuantitatif dan kualitatif. Selain itu juga perbedaan variable yaitu penelitian sebelumnya terdapat variable moderasi sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini hanya menggunakan variable independent dan dependen saja. Serta duplikasi juga dari penelitian Nurillah & Muid (2014), terdapat perberbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu perbedaan tempat lokasi penelitian sehingga variable nya juga menyesuaikan karena ada variable yang memang kurang aktif di lokasi penelitian sekarang, dimana Nurillah & Muid (2014) menggunakan empat variable independent kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan tiga variable yaitu Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sumber Daya Manusia. Sehingga memiliki perbedaan juga pada sampel penelitian sekarang. Maka dari itu, secara keseluruhan perbedaan yang terdapat pada variable, jenis penelitian, sampel penelitian, dan lokasi penelitian sehingga penelitian ini layak dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan?
2. Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat berperan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, memberikan kontribusi yang berharga bagi praktik akuntansi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemerintahan, serta memberikan wawasan yang berguna bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah melalui penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

1.4.2 Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan akuntansi khususnya pemerintahan dan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam pembuatan penelitian dan hipotesis, serta di dalam bab ini terdapat kerangka penelitian yang menjelaskan garis besar penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang penentuan sampel dan populasi dalam penelitian ini, sumber data serta teknik pengumpulan data, variabel

penelitian, definisi operasional variabel serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari data yang telah diuji dan dilakukan berupa pembahasan berdasarkan hasil perhitungan dan pembuktian penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan atas penelitian ini, keterbatasan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Stewardship Theory

Menurut Murwaningsari (2009) Teori ini menggambarkan adanya korelasi yang signifikan antara kepuasan dan prestasi organisasi. Teori stewardship didasarkan pada pandangan filosofis tentang sifat manusia yang meyakini bahwa manusia dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan merupakan individu yang memiliki integritas.

Stewardship Theory dalam konteks pemerintahan sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah dan pejabat publik seharusnya menjalankan tugas mereka sebagai "pengelola" aset dan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Sehingga teori ini cocok untuk mendukung penelitian ini untuk memberikan pemahaman keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya, mampu menjawab keinginan masyarakat, bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan memberikan akuntabilitas perekonomian untuk mencapai tujuan keuangan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

2.1.2 Agency Theory

Dalam konteks pemerintahan demokratis, relasi antara pemerintah dan pihak yang memanfaatkan informasi keuangan pemerintah dapat dijelaskan sebagai suatu relasi agensi (Faristina, 2011). Teori Agensi (*Agency Theory*) dalam konteks

pemerintahan adalah sebuah kerangka kerja analitis yang digunakan untuk memahami hubungan antara "agen" (biasanya pejabat pemerintah atau birokrat) dan "prinsipal" (biasanya masyarakat atau pemilih) dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik dan penggunaan sumber daya publik. Teori ini secara khusus fokus pada bagaimana agen dapat atau tidak dapat memenuhi kepentingan prinsipal, serta bagaimana masalah agensi dapat diatasi.

Teori agensi (*agency theory*) juga dapat diterapkan dalam konteks aktivitas pelaporan keuangan daerah, terutama ketika ada hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Pemerintah daerah diharuskan untuk mengikuti standar akuntansi yang berlaku untuk sektor publik. Teori agensi dapat digunakan untuk memahami apakah pemerintah daerah mematuhi standar ini dengan benar atau apakah ada insentif atau kebijakan yang mungkin mengganggu pemenuhan standar tersebut

Sehingga teori tersebut digunakan untuk penelitian ini karena teori keagenan dilihat dalam pelaporan keuangan, ketika pemerintah bertindak sebagai pihak yang berwenang (agen), maka pemerintah harus juga mengungkapkan semua informasi yang diminta oleh pihak yang berkepentingan sebagai pengguna informasi bertindak sebagai principal.

2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian tindakan yang mencakup proses pengumpulan data, pencatatan, penggabungan data, dan penyusunan laporan keuangan, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sistem ini dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi computer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pertanggungjawaban, manajemen, dan pengendalian. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan keakuratan, kelengkapan, kepatuhan, serta ketaatan pada pedoman yang diterapkan dalam proses pencatatan, serta penyajian yang tepat waktu. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi yang baik merupakan komponen penting untuk mencapai karakteristik yang diinginkan dalam laporan keuangan. Tanpa penerapan sistem akuntansi yang tepat, sulit untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Permadi (2013) menyatakan bahwa semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik.

Karakteristik sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan indikator yaitu:

1. Kesesuaian sistem dengan SAP

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur akuntansi pemerintah. Kesesuaian sistem akuntansi daerah dengan SAP bisa menjadi indikator yang relevan.

2. Pengidentifikasian transaksi

Kemampuan sistem untuk mengidentifikasi semua transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah.

3. Pencatatan transaksi

Apakah sistem mampu mencatat setiap transaksi dengan baik, termasuk detail yang diperlukan untuk pelaporan dan analisis lebih lanjut.

4. Bukti disetiap transaksi

Sistem harus mampu menyediakan bukti atau dokumentasi yang mendukung setiap transaksi yang dicatat.

5. Pencatatan kronologis

Transaksi harus dicatat secara kronologis sesuai dengan urutan waktu mereka terjadi.

6. Pengklasifikasian transaksi

Sistem harus mampu mengklasifikasikan transaksi ke dalam kategori yang sesuai, seperti dana umum, dana khusus, atau dana cadangan.

7. Laporan keuangan disetiap periode

Kemampuan sistem untuk menghasilkan laporan keuangan secara teratur, seperti laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan.

8. Pelaporan yang konsisten dan periodic

Laporan keuangan harus disusun dengan konsistensi dan dipresentasikan secara periodik sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai sebuah proses yang tidak terpisahkan dari tindakan dan aktivitas yang terus-menerus dilakukan oleh para pemimpin dan seluruh pegawai dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan pengendalian intern ini, diharapkan akan memberikan keyakinan dan kepercayaan yang memadai terhadap kualitas dan keandalan informasi dalam laporan keuangan.

Menurut Rai (2008), Sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang disusun untuk memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa suatu organisasi telah mencapai tujuannya dengan sukses. Dalam suatu organisasi, pengendalian internal memiliki peran yang krusial karena membantu dalam mengatur dan mengkoordinasikan setiap aktivitas operasional. Terutama dalam konteks pemerintahan, pengendalian ini sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, semua aktivitas, khususnya dalam bidang keuangan, akan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik.

Sistem pengendalian internal merupakan pelaksanaan kebijakan atau prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengevaluasi apakah organisasi

mencapai tujuannya. Tentang fungsi keberadaannya Sistem pengendalian internal untuk mencegah kemungkinan penipuan dan memastikan Menerapkan peraturan dan undang-undang saat ini (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) Karakteristik sistem pengendalian intern diukur dengan indikator:

1. Kontrol Lingkungan (*Control Environment*)

Mencakup budaya organisasi, nilai-nilai, sikap, dan etika manajemen dan karyawan. Kontrol lingkungan menciptakan dasar bagi sistem pengendalian internal yang efektif.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Organisasi harus mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan mereka. Ini melibatkan proses identifikasi, penilaian, dan respons terhadap risiko-risiko tersebut.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Ini adalah tindakan konkret yang diambil untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan. Kegiatan pengendalian melibatkan pembagian tanggung jawab, prosedur, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk mengendalikan risiko.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem pengendalian internal harus mendukung aliran informasi yang sesuai dan efektif di seluruh organisasi. Ini termasuk pelaporan keuangan yang

akurat dan tepat waktu, serta komunikasi yang efektif tentang kebijakan dan prosedur.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Organisasi harus memantau efektivitas sistem pengendalian internal mereka secara terus-menerus. Pemantauan melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa mereka berfungsi seperti yang diharapkan.

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah salah satu aset yang ada dalam sebuah organisasi, mencakup semua individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut (Gomes, 2003). Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada kemampuan setiap individu di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan tanggung jawab. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi dapat diidentifikasi sebagai individu yang mampu mengelola potensi yang dimilikinya, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi yang berbeda. Hal ini membantu individu untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada di sekitarnya guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Karakteristik kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator:

1. Pemahaman tentang akuntansi

Tingkat pemahaman SDM tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, terutama dalam konteks akuntansi pemerintah, adalah indikator penting. Ini mencakup pemahaman tentang konsep dasar seperti pencatatan transaksi, pengklasifikasian dana, dan penyusunan laporan keuangan.

2. SDM yang berkualitas

Kualitas SDM mencakup pendidikan, pengalaman, dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan akuntansi dan pengendalian intern. Kualitas SDM dapat diukur melalui evaluasi kinerja dan pencapaian mereka dalam tugas-tugas akuntansi.

3. Sumber daya yang memadai, peran dan tanggung jawab, pelatihan keahlian

Indikator ini mencakup apakah pemerintah daerah memiliki jumlah SDM yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas akuntansi dengan baik. Selain itu, pemahaman dan pelaksanaan peran serta tanggung jawab SDM dalam konteks pengendalian intern juga relevan. Pelatihan keahlian yang sesuai dalam tugas-tugas akuntansi dan pengendalian intern juga bisa diukur.

4. Sosialisasi peraturan baru

Kemampuan SDM untuk memahami dan menerapkan peraturan baru yang terkait dengan akuntansi dan pengendalian intern pemerintah daerah adalah

indikator penting. Ini mencakup pemahaman dan implementasi perubahan peraturan hukum atau kebijakan yang mungkin terjadi.

5. Pemahaman tentang struktur organisasi

Pemahaman SDM tentang struktur organisasi pemerintah daerah, terutama dalam konteks akuntansi dan pengendalian intern, dapat membantu efisiensi dan kerja sama dalam proses pelaporan dan pengendalian.

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah dokumen berstruktur yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut panduan yang diberikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2007, laporan keuangan adalah bagian dari rangkaian pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang komprehensif biasanya mencakup elemen-elemen seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan, serta laporan lainnya beserta penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan tersebut.

Kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai penyediaan informasi keuangan yang memenuhi kebutuhan para pengguna serta menjaga kepentingan pemilikinya, dengan berlandaskan pada sifat-sifat kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan yang lengkap dan tepat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar

Akuntansi Pemerintah. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah, terdapat paragraf 35 yang mengidentifikasi empat karakteristik kualitatif yang harus dimiliki oleh laporan keuangan, yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat sifat ini merupakan syarat yang diatur secara normatif yang harus ada agar laporan keuangan pemerintah memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan.

1. Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan ketika informasi yang terkandung di dalamnya memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan pengguna. Informasi ini membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa yang telah terjadi atau tengah berlangsung saat ini, serta membantu mereka meramalkan peristiwa yang akan datang. Selain itu, informasi ini juga dapat memperkuat atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dari masa lalu. Dengan kata lain, informasi yang relevan dalam laporan keuangan dapat dihubungkan dengan tujuan penggunaannya. Informasi dianggap relevan jika:

- a. Memberikan manfaat umpan balik (nilai umpan balik): Informasi memungkinkan pengguna untuk mengonfirmasi atau mengoreksi perkiraan atau harapan mereka dari masa lalu.
- b. Mempunyai manfaat prediktif (nilai prediktif): Informasi membantu pengguna dalam meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan situasi saat ini.
- c. Disediakan dalam waktu yang tepat: Informasi disampaikan dengan tepat waktu sehingga dapat memberikan dampak dan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan.
- d.

Lengkap: Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan sekomprensif mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang mungkin ada. Selain itu, informasi ini menjelaskan latar belakang dari setiap informasi utama yang ada dalam laporan keuangan dengan jelas untuk menghindari kebingungan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari interpretasi yang menyesatkan dan kesalahan yang signifikan, serta harus menggambarkan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Terkadang, informasi mungkin relevan, tetapi jika sifat atau penyajian informasi tersebut tidak dapat dipercaya, maka penggunaan informasi tersebut berpotensi menyesatkan. Informasi yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian yang Jujur: Informasi mencerminkan secara jujur transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang dapat diharapkan untuk disajikan dengan wajar.
- b. Dapat Diverifikasi (verifikasi): Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan ketika pengujian dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.
- c. Netralitas: Informasi disusun untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak memihak kepada pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dengan laporan keuangan dari entitas lain secara umum. Perbandingan ini dapat dilakukan baik di tingkat internal maupun eksternal. Dalam perbandingan internal, entitas memiliki kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun. Sementara dalam perbandingan eksternal, entitas yang dibandingkan juga mengikuti kebijakan akuntansi serupa. Jika entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada yang sedang diterapkan, perubahan tersebut harus diungkapkan dalam periode ketika perubahan tersebut terjadi.

4. Dapat dipahami

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus dapat dengan mudah dimengerti oleh para pengguna dan harus disajikan menggunakan bahasa dan istilah yang sesuai dengan pemahaman mereka. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa para pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas dan lingkungan operasional entitas yang melaporkan, dan juga bahwa mereka bersedia untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan tersebut.

2.2 Telaah Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai hal penting dalam melaksanakan penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan referensi acuan pelaksanaan

penelitian. Penelitian terdahulu berperan sebagai pembanding terhadap penelitian yang dikerjakan dengan penelitian yang sekarang. Berikut penelitian yang berkaitan dengan kajian penelitian ini:

(Rahayu & Kanita, 2023) Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh moderasi sistem akuntansi keuangan daerah, mengetahui kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, penentuan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas penatagunaan keuangan daerah

(Nazira, 2023) Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem akuntansi pemerintah daerah memengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia saat ini. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh apa yang diberikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah, yang menghasilkan kehadiran apakah ada peningkatan atau penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah lokalitas Indonesia. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem akuntansi daerah mempengaruhi laporan keuangan dari segi kualitas, yang ditunjukkan dengan peningkatan fungsi, tujuan, dan akuntabilitas. Ada juga peraturan untuk memberikan laporan yang rinci dan tepat. waktu meningkatkan laporan keuangan.

(Ismail et al, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulannya, sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

(Rahman & Permatasari, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh keterampilan sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sistem keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan sistem keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan sumber daya manusia pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan.

(Hasanah & Siregar, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan keterampilan sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan OPD di Kabupaten Labuhan batu. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan variabel

sistem pengendalian internal dan keterampilan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, variabel yang mempengaruhi penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi.

(Launtu, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gowa.

(Indrayani & Widiastuti, 2020) Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel moderasi. Sehingga diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal memberikan dampak positif pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kemampuan Sumber Daya Manusia membantu mengendalikan sistem akuntansi.Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Kualitas Laporan Intern Keuangan Daerah.

(Murapi, 2016) Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi yang diberikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tetapi tidak dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia.

(Yuliani & Agustini, 2016) Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menguji faktor – faktor yang akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKD dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap LKPD sedangkan kompetensi SDM, penerapan SAP, dan SPI tidak berpengaruh positif terhadap LKPD.

(Nurillah & Muid, 2014) Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan berkorelasi dengan variabel bebas seperti sumber daya manusia, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD), dan sistem pengendalian intern. Sehingga diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif yang signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Rahayu & Kamita, 2023)	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dan Sistem Pengendalian Intern. Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Secara simultan variabel pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, penentuan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas penatagunaan keuangan daerah
2	(Nazira, 2023)	Variabel Independen: Pengaruh Sistem Akuntansi Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Sistem akuntansi daerah mempengaruhi laporan keuangan dari segi kualitas, yang ditunjukkan dengan peningkatan fungsi, tujuan, dan akuntabilitas. Ada juga peraturan untuk memberikan laporan yang rinci dan tepat. waktu meningkatkan laporan keuangan
3	(Ismail et al, 2021)	Variabel Independen: Pengaruh Sistem Akuntansi (SAKD), Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulannya, sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian

			internal dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	(Rahman & Permatasari, 2021)	Variabel Independen: Kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	sumber daya manusia dan sistem keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan sistem keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan sumber daya manusia pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan
5	(Hasanah & Siregar, 2021)	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan OPD	Standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan variabel sistem pengendalian internal dan keterampilan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, variabel yang mempengaruhi penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi.
6	(Launtu, 2021)	Variabel Independen: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sumberdaya Manusia	secara parsial dan simultan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

		Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	keuangan pemerintah Kabupaten Gowa.
7	(Indrayani & Widiastuti, 2020)	Variabel Independen: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Variabel Moderasi: Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal memberikan dampak positif pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kemampuan Sumber Daya Manusia membantu mengendalikan sistem akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Kualitas Laporan Intern Keuangan Daerah.
8	(Murapi, 2016)	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tetapi tidak dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber
9	(Yuliani & Agustini, 2016)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pengendalian Intern	penerapan SAKD dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap LKPD sedangkan kompetensi SDM, penerapan SAP, dan SPI tidak berpengaruh positif terhadap LKPD.

		Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
10	(Nurillah & Muid, 2014)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif yang signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber: Peneliti, 2023

Salah satu alasan penelitian perlu dilakukan lagi karena adanya variable indepen yang berbeda dengan peneliatian terdahulu dan jenis penelitian *mix methods* (campuran) serta juga adanya perbedaan lokasi penelitian terdahulu dengan sekarang. Sehingga penelitian ini layak untuk dikaji lagi dengan variable, jenis penelitian, dan lokasi penelitian yang berbeda.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah peneliti uraikan, maka dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.3.1 Penerapan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ini dipengaruhi oleh stewardship. SAKD mengatur tentang pengungkapan informasi keuangan yang relevan bagi entitas daerah. Ini sesuai dengan prinsip Stewardship yang mengharapkan manajer untuk mengungkapkan

informasi keuangan yang akurat dan lengkap kepada pemilik atau masyarakat sebagai bentuk itikad baik.

Penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016) pada SKPD Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Murapi (2016) di SKPD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari kedua penelitian tersebut didapatkan konsistensi hasil.

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Penerapan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SPI merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa fungsi mereka sebagai "steward" atau pengelola dana publik dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Stewardship *Theory* yang mendorong pemerintah untuk bertindak dengan itikad baik dan efisien dalam penggunaan dana publik. Dan SPI juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengelola konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam hubungan antara pemerintah (agen) dan masyarakat atau pemegang kepentingan

publik (*principal*), sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajukan dalam *Agency Theory*

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, mengukur sumber daya suatu organisasi, serta memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*). SPI terdiri atas kebijakan dan prosedur digunakan untuk mencapai sasaran dan terjaminnya laporan keuangan yang andal, serta menjamin dipatuhinya peraturan dan hukum yang berlaku (Pradono & Basukianto, 2015).

Penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Pradono & Basukianto (2015) pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah & Muid (2014) pada SKPD Kota Depok. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari kedua penelitian tersebut didapatkan konsistensi hasil.

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam konteks *Stewardship Theory*, kompetensi SDM adalah salah satu elemen kunci yang mendukung pelaksanaan peran pemerintah sebagai pengelola yang efektif dan bertanggung jawab atas aset dan sumber daya publik. Kemampuan dan pengetahuan yang tepat membantu pemerintah menjalankan peran stewardship mereka dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat dan pemilik sumber daya publik. Dan sesuai pada *Agency theory* kompetensi SDM memainkan peran penting dengan memastikan bahwa agen pemerintah memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka, bertindak dengan itikad baik, dan dipantau dengan baik oleh prinsipal (masyarakat atau pemegang kepentingan publik).

Dalam upaya untuk mencapai tata kelola keuangan daerah yang efektif, pemerintah daerah harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam hal ini, diperlukan sumber daya yang memiliki keahlian yang cukup, karena kompetensi dan kualitas sumber daya ini sangat berperan dalam menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya (Kartopawiro & Susanto, 2018). Laporan keuangan menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan APBD adalah instrumen utama dalam proses pertanggungjawaban dan laporan tersebut juga menjadi dasar bagi DPRD dan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan alat atau sistem yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan kesuksesannya sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, dalam

manajemen SAKD, diperlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi agar dapat memahami SAKD secara menyeluruh, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan bebas dari kesalahan, karena penyusunan laporan keuangan yang akurat memerlukan tim yang memahami sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan baik.

Dalam konteks *Stewardship Theory*, kompetensi SDM adalah salah satu elemen kunci yang mendukung pelaksanaan peran pemerintah sebagai pengelola yang efektif dan bertanggung jawab atas aset dan sumber daya publik. Kemampuan dan pengetahuan yang tepat membantu pemerintah menjalankan peran stewardship mereka dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat dan pemilik sumber daya publik. Dan sesuai pada *Agency theory* kompetensi SDM memainkan peran penting dengan memastikan bahwa agen pemerintah memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka, bertindak dengan itikad baik, dan dipantau dengan baik oleh prinsipal (masyarakat atau pemegang kepentingan publik).

Sistem pengendalian internal adalah suatu rencana yang mencakup struktur organisasi dan semua metode yang digunakan di dalam organisasi untuk menjaga keamanan aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Pratolo dkk, 2016). Pemahaman yang benar terhadap implementasi sistem pengendalian internal tentu sangat bergantung pada kompetensi dari individu yang menggunakannya. Pemahaman yang akurat terhadap sistem pengendalian internal memungkinkan konsistensi dalam implementasinya

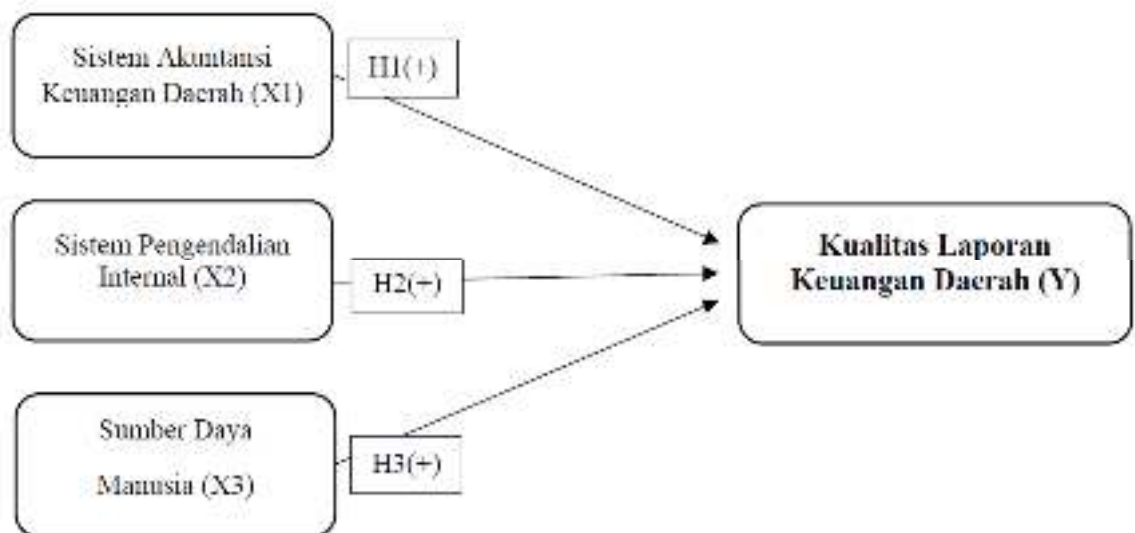
dan juga memaksimalkan manfaatnya dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Gambar 2. 1

Kerangka Penelitian



Sumber: Peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Mix Methods* (campuran). Dalam bidang metode penelitian campuran, mendefinisikan penelitian campuran sebagai pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi guna menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena penelitian (Creswell, 2014).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jenis penelitian mix methods cocok untuk penelitian ini karena memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bulungan. Pemilihan SKPD sebagai sampel penelitian karena pemilihan tersebut sesuai dengan judul topik yang peneliti gunakan.

SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bulungan meliputi 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 6 Badan, dan 30 Dinas. Sedangkan untuk dijadikan sampel penelitian 1 Sekretariat, 1 Inspektorat, 4 Badan, dan 16 Dinas. Berikut daftar SKPD yang dijadikan sampel:

Tabel 3. 1

Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan

NO	NAMA SKPD
1	Sekretariat DPRD
2	Inspektorat
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5	Badan Pendapatan Daerah
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8	Dinas Kesehatan
9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
16	Dinas Perikanan
17	Dinas Lingkungan Hidup
18	Dinas Sosial
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
21	Dinas Kecamatan Tanjung Selor
22	Dinas Kecamatan Bunyu

Sumber: peneliti, 2023

Pengambilan sampel terhadap responden akan dilakukan secara *purposive sampling*. Sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dapat ditetapkan untuk mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah; 1) pejabat structural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada masing-masing SKPD, 2) memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada periode penyusunan laporan keuangan daerah.

3.3 Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada jenis penelitian *mix methods* (campuran) yaitu yang terdiri dari; 1) data primer pada penelitian kuantitatif dengan sumber data yang diperoleh berasal dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, 2) data wawancara pada penelitian kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa informan yang memiliki keterkaitan melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di SKPD tertentu.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independent dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal, serta kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

3.4.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian langkah-langkah yang terlibat dalam proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, yang bisa dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer. Langkah-langkah ini mencakup berbagai proses, termasuk pengumpulan data, pencatatan, penggabungan informasi, dan penyusunan laporan keuangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007).

Variabel sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan indikator yaitu; 1) kesesuaian sistem dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

2) kemampuan mengidentifikasi transaksi, 3) proses pencatatan transaksi, 4) ketersediaan bukti untuk setiap transaksi, 5) pengaturan pencatatan secara kronologis, 6) pengklasifikasian transaksi, 7) penyusunan laporan keuangan pada setiap periode, dan serta 8) pelaporan yang konsisten dan periodik.

3.4.1.2 Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengartikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai suatu proses yang melekat dalam tindakan dan aktivitas yang terus-menerus dilakukan oleh pemimpin dan semua anggota staf untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan aktivitas yang efektif dan efisien, menjaga keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset negara, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal adalah pelaksanaan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai apakah organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Fungsi utama dari sistem pengendalian internal adalah mencegah potensi penipuan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku saat ini (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) Karakteristik sistem pengendalian intern diukur dengan indikator yaitu; 1) Kontrol Lingkungan (*Control Environment*). 2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*). 3) Kegiatan Pengendalian (*Control*

Activities). 4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*). 5) Pemantauan (*Monitoring*)

3.4.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara mengelola sumber daya dan bertanggung jawab. Individu yang memiliki kompetensi yang berkualitas adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola potensi yang dimilikinya dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi yang berbeda. Hal ini akan membantu individu untuk maksimal dalam mengelola potensi dan sumber daya di sekitarnya guna mencapai kesejahteraan hidupnya (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator yaitu; 1) pemahaman tentang akuntansi, 2) SDM yang berkualitas, 3) sumber daya yang memadai, peran dan tanggung jawab, pelatihan keahlian dalam tugas, 4) sosialisasi peraturan baru dan 5) pemahaman tentang struktur organisasi.

3.4.2 Variabel Dependen

3.4.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas apabila laporan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif yang meliputi; 1) andal,

2) relevan, 3) dapat dipahami dan 4) dapat dibandingkan (Surastiani & Handayani, 2015).

Tabel 3.2

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Skala
Variabel Independen Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	Variabel sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan indikator yaitu; 1) kesesuaian sistem dengan SAP, 2) pengidentifikasian transaksi, 3) pencatatan transaksi, 4) bukti disetiap transaksi, 5) pencatatan kronologis, 6) pengklasifikasian transaksi, 7) laporan keuangan disetiap periode serta 8) pelaporan yang konsisten dan periodik.	1. Kesesuaian system dengan SAP 2. Identifikasi transaksi 3. Pencatatan transaksi 4. Bukti transaksi 5. Pencatatan kejadian 6. Klasifikasi transaksi 7. Laporan keuang pada setiap periode 8. Pelaporan konsisten dan periodik	Likert: variabel ini akan diukur dengan 8 pertanyaan yang berskala 1 sampai dengan 4 dimana satu menyatakan sangat tidak setuju dan empat menyatakan sangat setuju.
Variabel Independen: Penerapan Sistem Pengendalian Internal (X2)	Menurut COSO (<i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>) Karakteristik sistem pengendalian intern diukur dengan indikator yaitu; 1) Kontrol Lingkungan (<i>Control Environment</i>), 2) Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>), 3) Kegiatan Pengendalian (<i>Control Activities</i>), 4) Informasi dan Komunikasi (<i>Information and Communication</i>), 5) Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan	Likert: variabel ini akan diukur dengan 5 pertanyaan yang berskala 1 sampai dengan 4 dimana satu menyatakan sangat tidak setuju dan empat menyatakan sangat setuju.
Variabel Independen: Kompetensi	Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan	1. Pemahaman akuntansi	Likert: variabel ini akan diukur

Sumber Daya Manusia (X3)	indikator yaitu: 1) pemahaman tentang akuntansi, 2) SDM yang berkualitas, 3) sumber daya yang memadai, peran dan tanggung jawab, pelatihan keahlian dalam tugas, 4) sosialisasi peraturan baru dan 5) pemahaman tentang struktur organisasi.	2. SDM berkualitas 3. SDM tersedia, berperan, dan tanggung jawab, mampu melakukan pelatihan keahlian sesuai tugas 4. Sosialisasi peraturan yang ada/ terbaru 5. Paham struktur organisasi	dengan 8 pertanyaan yang berskala 1 sampai dengan 4 dimana satu menyatakan sangat tidak setuju dan empat menyatakan sangat setuju.
Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan indikator yaitu, relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dipahami 4. Dapat dibandingkan	Likert: variabel ini akan diukur dengan 11 pertanyaan yang berskala 1 sampai dengan 4 dimana satu menyatakan sangat tidak setuju dan empat menyatakan sangat setuju

Sumber: data primer, diolah

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Data Campuran (*Mixed Data Analysis*)

Analisis ini merupakan analisis dimana peneliti menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Analisis ini dapat dilakukan dengan wawancara (*interview*) terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif lalu diikuti penyebaran kusioner untuk memperoleh data kuantitatif.

3.5.1.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang memiliki keterkaitan melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di SKPD tertentu, diantaranya: Pejabat structural dan aparat BKAD yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yaitu sebagai team penyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dan Pejabat structural dan aparat Inspektorat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yaitu sebagai pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sebelum diserahkan kepada BPK.

3.5.1.2 Angket (Kusioner)

Angket adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian sejumlah pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk mereka isi. Penggunaan angket sebagai teknik pengumpulan data menjadi efisien ketika peneliti memiliki pemahaman yang jelas tentang variabel yang akan diukur dan dapat memprediksi respons yang dapat diharapkan dari responden. Dengan melakukan beberapa metode analisis data pada penelitian, yaitu:

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data dengan memeriksa nilai-nilai seperti rata-rata, standar deviasi,

modus, dan nilai maksimum-minimum. Tindakan ini bertujuan untuk menguraikan karakteristik keseluruhan sampel yang telah dikumpulkan dan memastikan bahwa sampel tersebut memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian (Iqbal Hasan, 2002).

2. Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data: Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu alat ukur mampu menjalankan tugasnya dengan akurasi dan ketepatan. Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi Pearson, di mana evaluasi mencakup perhitungan koefisien korelasi yang mengindikasikan hubungan antara skor pertanyaan individual dan skor total. Pertanyaan dianggap valid jika nilai r hitung melebihi nilai r tabel yang ditetapkan

Uji Reliabilitas Data: Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kesungguhan responden menjawab pertanyaan menggunakan teknik Cronbach's Alpha. Semakin besar nilai alpha (mendekati 1) akan semakin reliabel data tersebut.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data: Tujuan uji normalitas data dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model statistic variable penelitian berdistribusi normal. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penelitian ini yaitu keberhasilan penelitian ini tergantung pada seberapa dekat distribusi sampel cocok dengan

distribusi teoritis. Ghozali (2022) menyatakan bahwa distribusi data yang normal atau hamper normal diperlukan untuk keberhasilan model regresi.

Uji Multikolinearitas: Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda korelasi antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu dengan memeriksa VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai toleransi. Jika VIF melebihi 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,10, maka hal tersebut menunjukkan adanya indikasi Multikolinieritas (Ghozali, 2016)

Uji Heteroskedastisitas: Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah terdapat variasi yang tidak konsisten dalam model regresi dari satu observasi ke observasi lainnya, yang disebut sebagai homoskedastisitas. Dalam konteks model regresi yang baik, homoskedastisitas diinginkan, sementara heteroskedastisitas tidak diinginkan. Keheteroskedastisan dapat diidentifikasi melalui pola yang terlihat pada grafik scatterplot. Jika titik-titik pada grafik membentuk pola tertentu yang teratur (seperti gelombang), itu menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik tersebar secara merata di atas dan di

bawah nol pada sumbu Y, maka itu menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas (Ghozali, 2022).

4. Uji Signifikan

Uji Regresi Linear Berganda: Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Model analisis berganda, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2022). Variabel dependen diasumsikan random, yang berarti mempunyai distribusi probabilitas. Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap dalam pengambilan sampel yang berulang.

Persamaannya adalah: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

X1 = Penerapan SKAD

X2 = Penerapan SPI

X3 Kompetensi SDM

$\beta_0 \beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Uji Koefisien Determinasi: Koefisien Determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen seperti yang dijelaskan oleh (Ghozali, 2022). R^2 memiliki rentang nilai antara nol dan satu. Ketika R^2 memiliki nilai yang rendah, ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, ketika nilai R^2 mendekati satu, itu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan sebagian besar atau hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Statistik F: Uji Statistik F merupakan sebuah evaluasi komprehensif yang bertujuan untuk menentukan apakah model regresi memiliki kesesuaian yang memadai untuk digunakan. Pengujian ini memanfaatkan uji statistik-F. Jika nilai probabilitasnya kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan (misalnya, $\text{Sig.} \leq 5\%$), maka model penelitian dianggap cocok atau layak digunakan. Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih besar daripada tingkat signifikansi ($\text{Sig.} > 5\%$), maka model penelitian dianggap tidak sesuai atau tidak layak.

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menilai apakah suatu hipotesis dapat disetujui atau tidak (Silalahi, 2015). Hasil dari uji hipotesis dianggap

signifikan jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor kebetulan dan sesuai dengan batas peluang yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu 5%. Apabila tingkat signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis akan ditolak. Namun, jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis akan diterima (Ghozali, 2022).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal serta kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten bulungan. Pada penelitian ini dengan sasaran 22 SKPD yang ada di Kabupaten Bulungan untuk dijadikan responden tepatnya pada bidang keuangan/ tata usaha keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner dan wawancara beberapa informan yang memiliki keterkaitan melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di SKP Kabupaten Bulungan. Hasil dari jawaban-jawaban responden dan wawancara tersebut akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan sebelumnya, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver 26. Nantinya hasil pengolahan data digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima maupun ditolak.

4.1 Wawancara (*interview*)

Pada tahap ini, sebelum menjelaskan terkait hasil dan pembahasan pengujian yang dilakukan. Penulis melakukan wawancara kepada Pejabat struktural dan aparat BKAD yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yaitu

sebagai team penyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dan Pejabat structural dan aparat Inspektorat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yaitu sebagai pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK secara daring melalui media komunikasi whatsapp.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Subbidang Akuntansi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan yang menyampaikan bahwa “Sesuai dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 90 tahun 2022 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah adalah alat yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Itu juga membantu mendukung prinsip-prinsip good governance atau tata kelola yang baik dalam administrasi pemerintahan daerah kabupaten bulungan. Serta memastikan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan di daerah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti standar yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi terkait, Menilai pemahaman dan komitmen dari pihak-pihak terkait (seperti kepala daerah, anggota dewan, dan pejabat keuangan) terhadap pentingnya sistem pengendalian internal”.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Inspektur Inspektorat di Kabupaten Bulungan terkait penerapan sistem pengendalian internal pada SKPD yang ada di Kabupaten Bulungan. Penyampaian inspektur bahwa “Sistem pengendalian internal pada kabupaten bulungan memang masih kurang diperhatikan bagi organisasi maupun individu yaitu masih kurang pada sumber daya manusia yang kurang kompeten, kurang kesadaran dan kurangnya

pemahaman teknis. Tetapi dalam praktiknya Inspektorat sudah maksimal dalam menjalankan tugas yaitu pelan-pelan membangun kesadaran individu mengenai pengendalian internal merupakan sesuatu hal yang penting. Serta mendapatkan kesaksian dari pihak terkait tentang keberhasilan implementasi sistem akuntansi baru, termasuk peningkatan efisiensi, akurasi, dan ketersediaan informasi keuangan secara real-time, dan Memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang cukup untuk memahami perubahan regulasi, teknologi, dan prosedur akuntansi”.

4.2 Kuesioner (*google form*)

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dikirimkan langsung kepada pegawai dibagian keuangan. Kuesioner dalam bentuk *google form* diberikan secara daring (*online*) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan. Jumlah kuesioner (*gform*) yang dibagikan sebanyak 86 kuesioner, dimana 70 kuesioner kembali dan sebanyak 70 kuesioner yang memenuhi kriteria untuk diolah. Berikut adalah ringkasan tabel berdasarkan karakteristik responden:

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini merupakan tabel jenis kelamin responden yang diperoleh dari kuisisioner penelitian:

Tabel 4. 1

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	52	43,4%
Wanita	68	56,7%
Jumlah	120	100%

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin wanita merupakan yang lebih banyak dipilih yaitu berjumlah 68 orang atau sebesar 56,7% dari total responden.

b. Responden Berdasarkan Umur

Berikut ini merupakan tabel umur responden yang diperoleh dari kuisisioner penelitian:

Tabel 4. 2

Umur

Umur	Jumlah	Persentase
21 – 30 tahun	5	4%
31 – 40 tahun	30	25%
41 – 50 tahun	50	42%
51 – 60 tahun	35	29%
Jumlah	120	100%

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel umur diatas, diperoleh hasil bahwa responden terbanyak merupakan responden yang berumur 41-50 tahun atau sebesar 49% dari total responden

c. Responden Berdasarkan Riwayat Pendidikan

Berikut ini merupakan tabel Riwayat Pendidikan responden yang diperoleh dari kuisisioner penelitian:

Tabel 4.3

Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	10	8%
Diploma (D3)	4	3%
Sarjana (S1)	88	73%
Magister (S2)	18	15%
Jumlah	120	100%

Sumber: data primer, diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 merupakan yang paling banyak dipilih yaitu berjumlah 88 orang atau 73% dari total responden.

d. Responden Berdasarkan Instansi/Unit Kerja

Berikut ini merupakan tabel instansi/unit kerja responden yang diperoleh dari kuisisioner penelitian:

Tabel 4. 4
Instansi/Unit Kerja

NO	NAMA SKPD	Jumlah	Persentase
1	Sekretariat DPRD	4	3,3%
2	Inspektorat	7	5,8%
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	8	6,7%
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	7	5,8%
5	Badan Pendapatan Daerah	5	4,2%
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	4,2%
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6	5,0%
8	Dinas Kesehatan	4	3,3%
9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5	4,2%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6	5,0%
11	Dinas Ketahanan Pangan	7	5,8%
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6	5,0%
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6	5,0%
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	7	5,8%
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	5,0%
16	Dinas Perikanan	4	3,3%
17	Dinas Lingkungan Hidup	4	3,3%
18	Dinas Sosial	4	3,3%
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	3,3%
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	4,2%
21	Dinas Kecamatan Tanjung Selor	4	3,3%
22	Dinas Kecamatan Bunyu	6	5,0%
Jumlah		120	100%

Sumber: data primer, diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa responden terbanyak berasal dari instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan yaitu berjumlah 8 orang atau 6,7% dari total responden.

e. Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berikut ini merupakan tabel masa kerja responden yang diperoleh dari kuisisioner penelitian:

Tabel 4. 5

Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1- 5 tahun	4	3,3%
6 – 10 tahun	16	13,4%
> 10 tahun	100	83,3%
Jumlah	120	100%

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa lama bekerja yang lebih banyak dipilih oleh responden adalah > 10tahun atau sebesar 83,3% dari total responden.

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi mengenai suatu data. Dalam penelitian ini analisis hasil pengujian statistik deskriptif menggunakan nilai minimum, nilai maximum, nilai mean, dan nilai standard deviation. Berikut hasil analisis pengujian statistik deskriptif dan analisis penelitian:

Tabel 4. 6

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	120	2.00 (SAKD4 & SAKD5)	4.00 (Semua Indikator)	28.5667	3.08352
Sistem Pengendalian Internal	120	2.00 (SPI2)	4.00 (Semua Indikator)	17.0583	2.03868
Sumber Daya Manusia	120	3.00 (SDM2)	4.00 (Semua Indikator)	27.2750	3.00689
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	120	3.00 (LKPD2)	4.00 (Semua Indikator)	38.6917	3.68462

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan table 4.6 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai minimum pada indikator SAKD2 dan SAKD 5 dengan nilai minimum 2.00 dan untuk nilai maksimum yang sama untuk semua indikator yaitu dengan nilai maksimum 4.00 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan. Nilai rata-rata sebesar 28,5667 merepresentasikan bahwa pada sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan pada instansi tersebut sudah baik. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,08352. Ukuran penyebaran data dari variable sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 3,08352 dari 120 responden.

2. Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai minimum pada indikator SPI2 dengan nilai minimum 2.00 dan untuk nilai maksimum yang sama untuk semua indikator yaitu dengan nilai maksimum 4.00. Nilai rata-rata sebesar 17,0583 merepresentasikan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan di instansi tersebut sudah baik. Nilai standar deviasi sebesar 2,03868. Ukuran penyebaran data dari variabel sistem pengendalian intern adalah sebesar 2,03868 dari 120 responden.

3. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai minimum pada indikator SDM2 dengan nilai minimum 3.00 dan untuk nilai maksimum yang sama untuk semua indikator yaitu dengan nilai maksimum 4.00. Nilai rata-rata sebesar 27,2750 merepresentasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada instansi Pemerintah Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Nilai standar deviasi sebesar 3,00689. Ukuran penyebaran data dari variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 3,00689 dari 120 responden.

4. Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum pada indikator LKPD2 dengan nilai minimum 3.00 dan untuk nilai maksimum yang sama untuk semua indikator yaitu dengan nilai maksimum 4.00. Nilai rata-rata sebesar 38,6917 merepresentasikan bahwa kualitas laporan keuangan pada instansi tersebut sudah cukup baik. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,68462. Ukuran penyebaran data dari variabel kualitas laporan keuangan adalah sebesar 3,68462 dari 120 responden.

4.2.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode korelasi dari Pearson dimana pengujian dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi yang menyatakan hubungan antara skor butir pertanyaan dengan skor total. Pertanyaan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{table}$. Hasil uji validitas terangkum table 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 7**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	Sig.	r hitung	r tabel	Keterangan
SAKD	SAKD1	0,000	0,607	0,179	Valid
	SAKD2	0,000	0,724	0,179	Valid
	SAKD3	0,000	0,693	0,179	Valid
	SAKD4	0,000	0,544	0,179	Valid
	SAKD5	0,000	0,831	0,179	Valid
	SAKD6	0,000	0,757	0,179	Valid
	SAKD7	0,000	0,718	0,179	Valid
	SAKD8	0,000	0,645	0,179	Valid
SPI	SPI1	0,000	0,546	0,179	Valid
	SPI2	0,000	0,614	0,179	Valid
	SPI3	0,000	0,684	0,179	Valid
	SPI4	0,000	0,637	0,179	Valid
	SPI5	0,000	0,524	0,179	Valid
SDM	SDM1	0,000	0,639	0,179	Valid
	SDM2	0,000	0,626	0,179	Valid
	SDM3	0,000	0,703	0,179	Valid
	SDM4	0,000	0,667	0,179	Valid
	SDM5	0,000	0,512	0,179	Valid
	SDM6	0,000	0,588	0,179	Valid
	SDM7	0,000	0,630	0,179	Valid
	SDM8	0,000	0,541	0,179	Valid
LKPD	LKPD1	0,000	0,670	0,179	Valid
	LKPD2	0,000	0,653	0,179	Valid
	LKPD3	0,000	0,665	0,179	Valid
	LKPD4	0,000	0,602	0,179	Valid
	LKPD5	0,000	0,580	0,179	Valid
	LKPD6	0,000	0,642	0,179	Valid
	LKPD7	0,000	0,645	0,179	Valid
	LKPD8	0,000	0,622	0,179	Valid
	LKPD9	0,000	0,679	0,179	Valid
	LKPD10	0,000	0,629	0,179	Valid
	LKPD11	0,000	0,547	0,179	Valid

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas dapat diketahui besaran koefisien korelasi dari seluruh item pertanyaan variabel-variabel penelitian. Nilai R tabel dengan $n = 120$ dan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,179. Dari hasil perhitungan item pertanyaan variabel-variabel penelitian mempunyai nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel artinya seluruh item pertanyaan variabel-variabel

penelitian valid dan nilai Sig. < 0,05 sehingga dapat digunakan untuk mengukur data penelitian selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kesungguhan responden menjawab pertanyaan menggunakan teknik Cronbach's Alpha. Semakin besar nilai alpha (mendekati 1) akan semakin reliabel data. Hasil pengujian dapat dilihat pada table 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,842	Reliabel
Penerapan Sistem Pengendalian Internal	0,609	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,748	
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0,848	

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel penelitian tersebut mendekati 1 atau > 0,60. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel-variabel penelitian tersebut adalah reliabel, sehingga dapat digunakan untuk instrumen penelitian selanjutnya.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dasar Pengambilan Keputusan uji normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov:

- jika nilai Sig. > 0,05 maka data residual berdistribusi normal
- jika nilai Sig. < 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal

Berikut merupakan hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov:

Tabel 4. 9

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38045702
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.050
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Uji normalitas menggunakan One Kolmogorov-Smirnof menghasilkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data pada penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu dengan memeriksa VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai toleransi. Jika VIF melebihi 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,10, maka hal tersebut menunjukkan adanya indikasi Multikolinieritas. Berikut adalah hasil output Uji multikolinieritas:

Tabel 4. 10

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	Variance Inflation Factor (VIF)	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,865	1,156	Tidak Ada Multikolinieritas
Penerapan Sistem Pengendalian Internal	0,754	1,326	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,755	1,324	

Sumber: data primer, diolah

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel Independen (SKAD, SPI dan SDM) memiliki nilai tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data.

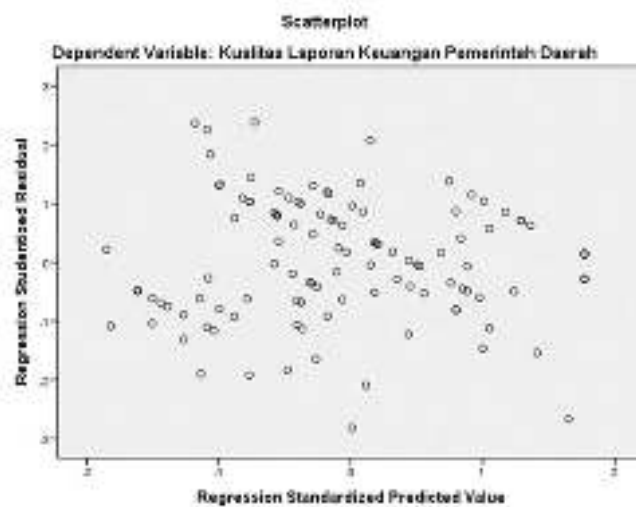
c. Uji Heteroskedasitas

Keheteroskedastisan dapat diidentifikasi melalui pola yang terlihat pada grafik scatterplot. Jika titik-titik pada grafik membentuk pola tertentu yang teratur (seperti gelombang), itu menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika

tidak ada pola yang jelas dan titik-titik tersebar secara merata di atas dan di bawah nol pada sumbu Y, maka itu menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Gambar 4. 1

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data karena plot pada scatter plot tidak membentuk suatu pola tertentu seperti titik-titik, membentuk pola yang teratur dan tidak ada pola yang jelas dimana titik-titik berdistribusi di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Adapun penulis juga melakukan heteroskedastisitas dengan cara glejser.

Dasar Pengambilan keputusan heteroskedastisitas uji glejser:

- Jika nilai Sig baru setelah menggunakan nilai ABSRES sebagai variabel dependent pada SPSS $< 0,05$ maka terdapat/terjadi heteroskedastisitas
- Jika nilai Sig baru setelah menggunakan nilai ABSRES pada SPSS $> 0,05$ maka tidak terdapat/terjadi heteroskedastisitas.

Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser:

Tabel 4. 11

Hasil Uji Heteroskedasitas

Variabel Independent	Sig.	Keterangan
SKAD (X1)	0,499	Tidak Ada Heterokedasitas
SPI(X2)	0,329	
SDM(X3)	0,057	

Sumber: data primer, diolah

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel Independen (SKAD, SPI dan SDM) memiliki nilai Sig. > 0,05 sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data.

4.2.4 Uji Signifikan

a. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 4. 12

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients B	Sig.
(Constant)	5,586	0,035
SKAD	0,493	0,000
SPI	0,577	0,000
SDM	0,337	0,000

Sumber: data primer, diolah

Model regresi yang didapat dari persamaan diatas adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 5,586 + 0,493 X_1 + 0,577 X_2 + 0,337 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstan sebesar 5,586 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Penerapan SKAD, Penerapan SPI, dan Kompetensi SDM bernilai konstan atau nol maka Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) sebesar 5,586.
2. Koefisien regresi variabel Penerapan SKAD positif sebesar 0,493, Dengan ini dapat diketahui bahwa terdapat hubungan searah antara variabel Penerapan SKAD dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang mana menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Penerapan SKAD 1 satuan dengan asumsi variabel lain bersifat konstan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meningkat sebesar 0,493.
3. Koefisien regresi variabel Penerapan SPI positif sebesar 0,577, Dengan ini dapat diketahui bahwa terdapat hubungan searah antara variabel Penerapan SPI dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang mana menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Penerapan SPI 1 satuan dengan asumsi variabel lain bersifat konstan maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meningkat sebesar 0,577.
4. Koefisien regresi variabel Kompetensi SDM positif sebesar 0,337, Dengan ini dapat diketahui bahwa terdapat hubungan searah antara variabel Kompetensi SDM dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang mana

menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Kompetensi SDM 1 satuan dengan asumsi variabel lain bersifat konstan maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurun sebesar 0,337.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4. 13

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
	0,763	0,583	0,572

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan nilai determinasi atau Adjusted R Square sebesar 0,572 yang berarti bahwa 52,7% variasi besarnya variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel penerapan SKAD, penerapan SPI dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan untuk sisanya sebesar 42,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

c. Statistik F

Pengujian ini memanfaatkan uji statistik-F. Jika nilai probabilitasnya kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan (misalnya, $\text{Sig.} \leq 5\%$), maka model penelitian dianggap cocok atau layak digunakan. Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih besar daripada tingkat signifikansi ($\text{Sig.} > 5\%$), maka model penelitian dianggap tidak sesuai atau tidak layak.

Tabel 4. 14

Hasil Uji Statistik F

Probabilitas (signifikan-F)	Keterangan
0,000	Signifikan

Sumber: data primer, diolah

Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah baik dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

4.2.5 Uji Hipotesis

Tabel 4. 15

Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients B	Sig.
(Constant)	5,586	0,035
SKAD	0,493	0,000
SPI	0,577	0,000
SDM	0,337	0,000

Sumber: data primer, diolah

Dari tabel di atas menunjukkan hasil pengujian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H1: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari penerapan sistem akuntansi pemerintahan. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,493 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini **diterima**.

Hasil ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah & Muid (2014) yang menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Depok.

2. H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari sistem pengendalian intern. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan

koefisien regresi sistem pengendalian intern sebesar 0,577 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis ketiga (H2) dalam penelitian ini **diterima**.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rahayu & Kanita (2023) yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya sistem pengendalian internal manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada OPD Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

3. H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari penerapan sistem akuntansi pemerintahan. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,337 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis keempat (H3) dalam penelitian ini **diterima**.

Hasil ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrayani & Widiastuti (2020) yang melakukan pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variable moderasi pada SKPD Kabupaten Klaten.

Hasil rangkuman pengujian hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. 16

Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan Hipotesis	B	Sig.	Kesimpulan
1	Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	0,493	0,000	Didukung
2	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	0,577	0,000	Didukung
3	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	0,337	0,000	Didukung

Sumber: data primer, diolah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa data yang diberikan kepada Pegawai pada bagian keuangan di 22 SKPD Kabupaten Bulungan sehingga diperoleh hasil 120 responden selanjutnya dilakukan Analisa dengan metode regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 26.0 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil hipotesis pertama. Menguji apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, penelitian menunjukkan bahwa hasil positif dan signifikan karena dihasilkan koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,493 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penerapan SKAD berpengaruh terhadap LKPD.

2. Hasil hipotesis kedua. Menguji apakah Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan, penelitian menunjukkan bahwa hasil positif dan signifikan karena koefisien regresi sistem pengendalian intern sebesar 0,577 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05.

Hal tersebut membuktikan bahwa Penerapan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap LKPD.

3. Hipotesis ketiga. Menguji apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan, penelitian menunjukkan bahwa hasil positif dan signifikan karena koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,337 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap LKPD.

4. Sejalan dengan penelitian kuantitatif yang dilakukan, selanjutnya yaitu kesimpulan penelitian kualitatif berasal dari 2 informan yang dapat disimpulkan jika Penerapan SKAD dan SPI serta Kompetensi SDM yang sudah berpengaruh baik terhadap LKPD.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal serta Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi informasi factor apa saja yang dapat menurunkan atau meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan.

5.3 Keterbatasan

Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pada sampel penelitian kualitatif yaitu wawancara hanya mendapatkan informasi pada 2 orang yang bersedia untuk memberikan informasi mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan, sehingga belum efektif dalam pengambilan kesimpulan.

2. Sampel penelitian yang hanya berjumlah 22 SKPD dan lokasi penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Bulungan, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk lingkup Indonesia.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan variable yaitu hanya meneliti 3 variabel yang berpengaruh terhadap LKPD yaitu variable Penerapan SKAD dan SPI serta Kompetensi SDM, sehingga sulit untuk menentukan kekonsistenan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu.

5.4 Saran

Dengan memerhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya pada metode penelitian mix methods diharapkan memperoleh informan yang setara dengan jumlah penyebaran kuesioner agar kesimpulan yang diambil bisa efektif.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lingkup lokasi yang lebih luas dan jumlah sampel penelitian yang lebih luas.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menganalisis factor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah sehingga bisa dapat menambah variable baru untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 102–116.
- Jamaluddin, Ismaturrehmi, & Yahya, Z. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Volume 4, No 1, 22-25.
- Baso, R., Suriyanto, & Asmelisa. (2022). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang. *Journal of Management*. Volume 5(3). 83-94
- Ichsan, T., Nugroho, H., & Friya, Y., (2013). Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Organisasi Sektor Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 12(1). 65-76
- Wati, Kadek Desiana.dkk. (2014). Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 2 No: 1 2014
- Murwaningsari, E. (2009). Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responbility dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 11(1), 30-41.
- Rosalin, F. (2011). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Studi pada BLU di Kota Semarang”. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Permadi, A. D. 2013. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Kota Bandung.” *Skripsi. Universitas Widyatama Bandung*.
- Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 188–200.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–13.
- Murapi, I. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Infestasi*, 12(2), 131–143.

- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 14(1), 56–64.
- Kartopawiro, S & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. 16(1), 1-14
- Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 423–432.
- Ismail, N., Marselina, A., & Loda, E. B. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pengendalian Internal, Dan Teknlogi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. *Open Journal Systems*, 15(12), 5889–5896.
- Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 14–27.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16.
- Hasanah, S. & Siregar, S. R. T. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia UNIMED*. Volume 9(1). 39-41
- Nazira, P, D,. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*. Volume 2(2). 152-164
- Rahman, A. & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 3(1).
- Pratolo, S., Yaya, R., & Sofyani, H. (2016). Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Konsep dan Implementasi-Untuk Akademisi dan Praktisi). Yogyakarta: LP3M-UMY.
- Agung, R. I. G. (2008). Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta: Grafindo.
- Gomes, F. C. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Andi Offset.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design - Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 139–149.
- Ghozali, Imam. (2022). *Aplikasi Multi Variat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Silalahi, U. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia: Bogor
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- _____. 2007. Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Pengantar Penelitian dan Pengambilan Data



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Yogyakarta Prof. Dr. Ai Parlobanda
Widyadarmas, Lembang Lela, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0271) 851546, 880007, 880296
F. (0271) 882589
E. revisi@uii.ac.id
M. www.uii.ac.id

Nomor : 1970/DEK/10/Div.URT/X/2023
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Pegawai Bidang Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

Assalamu alaikum wr.wl.

Diberitabukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Annisa Fitriani
No. Mahasiswa : 20312191
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda / 15 Desember 2001
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Sarjana
Alamat : Jl. Lombok No. 10 Dabag Kampung Widoro Baru Rt 25 Rw 009,
Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan"

Dosen Pembimbing : Mahmudi, Dr., S.E., M.Si., Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023



[Signature]
Juliandry Ardi, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, f
NIK: 943120101

Lampiran 2

Kuesioner Penelitian

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh pegawai bidang keuangan Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
2. Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas responden dengan mengisikan nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja.
3. Untuk menjawab kuesioner, Berilah tanda Check List (V) pada jawaban yang sesuai. Salah satu jawaban yang sesuai pada kolom pilihan jawaban yang tersedia, dengan keterangan sebagai berikut :
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
4. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setiap pernyataan hanya boleh diisikan satu jawaban.
5. Tidak ada jawaban yang salah. Mohon usahakan agar menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan tinggi sehingga tidak mengosongkan satu pun jawaban.

Identitas Responden

- Nama Bapak/ Ibu :
Jenis Kelamin : (diisi)
Usia : tahun (diisi)
Pendidikan Terakhir : (diisi)
 SMA Magister (S2)
 Diploma (D3) Lainnya...
 Sarjana (S1)
Instansi/Unit Kerja :
Lama Bekerja : (diisi)

Isilah kuesioner di bawah ini sesuai dengan keadaan ditempat Anda bekerja:

Pengukuran Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Penerapan sistem akuntansi pada instansi tempat Saya bekerja sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).				
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah melakukan analisis / identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan.				
3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, sudah melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi.				
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, pencatatan transaksi yang terjadi telah disertai bukti.				
5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, pencatatan dilakukan secara urut/sesuai dengan kronologi.				
6.	Pada instansi tempat Saya bekerja, dilakukan pencatatan setelah itu dilakukan klasifikasi pada setiap transaksi.				
7.	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja dibuat setiap periode akuntansi.				
8.	Pada instansi tempat Saya bekerja, Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.				

Pengukuran Penerapan Sistem Pengendalian Internal

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Dalam menciptakan lingkungan pengendalian, Instansi tempat Saya bekerja sudah menerapkan budaya organisasi yang baik, serta nilai-nilai, sikap, dan etika manajemen sudah baik				
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan.				
3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, pegawai sudah bisa mengambil tindakan konkret untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan.				
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, sudah mendukung aliran informasi berupa pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta komunikasi yang efektif tentang kebijakan dan prosedur.				
5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, memantau efektivitas sistem pengendalian internal secara terus-menerus. Pemantauan melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal.				

Pengukuran Kompetensi Sumber Daya Manusia

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Sub bagian keuangan/akuntansi pada instansi tempat Saya bekerja, telah memiliki sumber daya yang memadai dan paham Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).				
2.	Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan /akuntansi pada instansi tempat Saya bekerja telah ditetapkan secara jelas harus menerapkan SAKD tertera dalam <i>Peraturan Bupati Bulungan Nomor 90 Tahun 2022 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah</i>				

3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, diadakan pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas pada bidang pemahaman SAKD.				
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, Sub bagian keuangan/akuntansi telah memahami struktur organisasi pada instansi tersebut.				
5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, SDM bagian keuangan min lulusan D3 Akuntansi dan memahami SPI Pemerintah sehingga menerapkan SPI dalam lingkup pekerjaan				
6.	Sub bagian keuangan/akuntansi pada instansi tempat Saya bekerja telah memiliki sumber daya yang memadai dan paham SPI yang tertera pada <i>PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.</i>				
7.	Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan /akuntansi pada instansi tempat Saya bekerja wajib menerapkan SPI agar tercapainya tujuan organisasi.				
8.	Pada instansi tempat Saya bekerja, terdapat pelatihan khusus untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas pada bidang pemahaman SPIP.				

Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu.				
2.	Informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat Saya bekerja, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).				

3.	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang.				
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan keuangan disajikan dan diterbitkan tepat waktu sesuai periode akuntansi.				
5.	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan.				
6.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian setiap periode dari BPK RI.				
7.	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang jujur sesuai transaksi yang terjadi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.				
8.	Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja telah bebas dari pengertian yang menyesatkan.				
9.	Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja dapat memenuhi kebutuhan pengguna.				
10.	Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas				
11.	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja telah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.				

Lampiran 3

Data Responden

No.	Responden	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Instansi	Masa Kerja
1	1	Pria	59	S1	Inspektorat	>10 tahun
2	2	Wanita	53	S1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	>10 tahun
3	3	Pria	33	S1	Inspektorat	6-10 tahun
4	4	Wanita	29	SMA	Inspektorat	6-10 tahun
5	5	Wanita	54	SMA/SMK	Inspektorat	20 tahun
6	6	Wanita	37	S1	Inspektorat	> 10 tahun
7	7	Pria	57	S1	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	> 10 tahun
8	8	Pria	38	S1	Dinas Kecamatan Tanjung Selor	> 10 tahun
9	9	Pria	40	S1	Dinas Kecamatan Tanjung Selor	> 10 tahun
10	10	Wanita	43	S1	Dinas Ketahanan Pangan	> 10 tahun
11	11	Wanita	49	SMA/SMK	Dinas Perikanan	> 10 tahun
12	12	Wanita	47	S1	Dinas Kecamatan Tanjung Selor	> 10 tahun
13	13	Pria	40	S2	Inspektorat	> 10 tahun
14	14	Wanita	48	S1	Dinas Perikanan	> 10 tahun
15	15	Wanita	41	S1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1-5 tahun
16	16	Pria	44	S2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22 tahun
17	17	Pria	40	S1	Dinas Sosial	> 10 tahun
18	18	Wanita	33	S1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	6-10 tahun
19	19	Pria	49	S1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	> 10 tahun
20	20	Wanita	51	SMA/SMK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	> 10 tahun
21	21	Pria	26	S1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1-5 tahun
22	22	Wanita	32	S1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6-10 tahun
23	23	Wanita	44	S1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	> 10 tahun
24	24	Wanita	45	SMA/SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	> 10 tahun
25	25	Wanita	55	S1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6-10 tahun
26	26	Pria	43	S2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	> 10 tahun
27	27	Pria	35	S1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	> 10 tahun
28	28	Pria	32	S1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	> 10 tahun
29	29	Wanita	52	S1	Dinas Sosial	23 tahun
30	30	Wanita	25	S1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6-10 tahun

31	31	Wanita	55	S2	Sekretariat DPRD	> 10 tahun
32	32	Wanita	47	SMA/SMK	Dinas Sosial	> 10 tahun
33	33	Wanita	49	S1	Dinas Sosial	> 10 tahun
34	34	Wanita	44	S1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	> 10 tahun
35	35	Wanita	44	S1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	> 10 tahun
6	6	Wanita	41	D3	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	> 10 tahun
37	37	Pria	46	S1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	> 10 tahun
38	38	Wanita	48	SMA/SMK	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	> 10 tahun
39	39	Pria	48	S2	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	> 10 tahun
40	40	Wanita	43	SMA/SMK	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	> 10 tahun
41	41	Wanita	42	S1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	> 10 tahun
42	42	Pria	35	S1	Sekretariat DPRD	> 10 tahun
43	43	Wanita	41	S1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	> 10 tahun
44	44	Wanita	48	S1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	> 10 tahun
45	45	Wanita	44	S2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	> 10 tahun
46	46	Wanita	47	S1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	> 10 tahun
47	47	Pria	27	S1	Sekretariat DPRD	6-10 tahun
48	48	Pria	42	S1	Ketahanan Pangan	6-10 tahun
49	49	Wanita	43	S1	Sekretariat DPRD	22 tahun
50	50	Wanita	47	S1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	> 10 tahun
51	51	Wanita	56	S1	Ketahanan Pangan	> 10 tahun
52	52	Wanita	46	S1	Dinas Perikanan	> 10 tahun
53	53	Wanita	40	S1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	> 10 tahun
54	54	Pria	51	S1	Dinas Kesehatan	27 tahun
55	55	Pria	45	S2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	6-10 tahun
56	56	Pria	37	D3	Dinas Kesehatan	6-10 tahun
57	57	Wanita	41	S1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	> 10 tahun
58	58	Wanita	48	S1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	> 10 tahun
59	59	Wanita	37	S1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	> 10 tahun
60	60	Wanita	46	S1	Dinas Kesehatan	> 10 tahun
61	61	Wanita	45	S1	Dinas Kesehatan	> 10 tahun
62	62	Pria	38	S1	Badan Pendapatan Daerah	6-10 tahun
63	63	Pria	29	S1	Badan Pendapatan Daerah	1-5 tahun
64	64	Pria	59	S2	Badan Pendapatan Daerah	> 10 tahun
65	65	Pria	53	S2	Badan Pendapatan Daerah	> 10 tahun
66	66	Pria	46	S1	Badan Pendapatan Daerah	> 10 tahun
67	67	Wanita	40	S1	Dinas Lingkungan Hidup	> 10 tahun
68	68	Wanita	50	D3	Dinas Lingkungan Hidup	> 10 tahun
69	69	Pria	49	S1	Dinas Lingkungan Hidup	> 10 tahun
70	70	Wanita	38	S1	Dinas Lingkungan Hidup	18 tahun
71	71	Pria	36	D3	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	6-10 tahun
72	72	Pria	40	S1	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	> 10 tahun
73	73	Pria	46	S2	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	> 10 tahun
74	74	Wanita	50	S1	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	> 10 tahun
75	75	Pria	56	S1	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	> 10 tahun

76	76	Wanita	51	S1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	> 10 tahun
77	77	Wanita	47	S1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	> 10 tahun
78	78	Wanita	53	S1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	> 10 tahun
79	79	Pria	56	S1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	> 10 tahun
80	80	Wanita	51	S1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	> 10 tahun
81	81	Wanita	53	S1	Inspektorat	> 10 tahun
82	82	Wanita	53	S1	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	> 10 tahun
83	83	Wanita	59	S2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	> 10 tahun
84	84	Pria	58	S2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	> 10 tahun
85	85	Wanita	58	S1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	> 10 tahun
86	86	Wanita	54	S1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	> 10 tahun
87	87	Wanita	57	S2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	> 10 tahun
88	88	Pria	57	S1	Dinas Kecamatan Bunyu	> 10 tahun
89	89	Pria	48	S2	Dinas Kecamatan Bunyu	> 10 tahun
90	90	Wanita	45	S1	Dinas Kecamatan Bunyu	> 10 tahun
91	91	Wanita	42	S1	Dinas Kecamatan Bunyu	> 10 tahun
92	92	Wanita	42	S1	Dinas Kecamatan Bunyu	> 10 tahun
93	93	Wanita	34	S1	Dinas Kecamatan Bunyu	6-10 tahun
94	94	Wanita	36	S1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	> 10 tahun
95	95	Wanita	35	S1	Dinas Perikanan	6-10 tahun
96	96	Wanita	56	S1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	> 10 tahun
97	97	Pria	36	S1	Dinas Kecamatan Tanjung Selor	> 10 Tahun
98	98	Pria	33	S1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6-10 tahun
99	99	Pria	28	S1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1-5 tahun
100	100	Wanita	55	S1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	> 10 tahun
101	101	Wanita	38	S1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	> 10 tahun
102	102	Pria	36	S1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	> 10 tahun
103	103	Wanita	50	S1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	> 10 tahun
104	104	Pria	42	S1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	> 10 tahun
105	105	Pria	46	S1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	> 10 tahun
106	106	Pria	55	S1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	> 10 tahun
107	107	Pria	37	S1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	> 10 tahun
108	108	Wanita	36	S1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	> 10 tahun
109	109	Pria	38	S1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	> 10 tahun
110	110	Wanita	48	S1	Dinas Ketahanan Pangan	> 10 tahun
111	111	Wanita	55	S2	Dinas Ketahanan Pangan	> 10 tahun
112	112	Pria	57	S1	Dinas Ketahanan Pangan	> 10 tahun
113	113	Wanita	54	S1	Dinas Ketahanan Pangan	> 10 tahun
114	114	Pria	53	S2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	> 10 tahun
115	115	Pria	52	S2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	> 10 tahun
116	116	Pria	52	S1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	> 10 tahun
117	117	Pria	49	S1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	> 10 tahun
118	118	Pria	50	S2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	> 10 tahun
119	119	Pria	41	SMA/SMK	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	> 10 tahun
120	120	Pria	41	SMA/SMK	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	> 10 tahun

Lampiran 4

Data Nilai Jawaban Kuesioner

No.	Responden	SAKD1	SAKD2	SAKD3	SAKD4	SAKD5	SAKD6	SAKD7	SAKD8	SP11	SP12
1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	9	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	11	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	15	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
16	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	18	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
19	19	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
20	20	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
21	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
24	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	30	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
31	31	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
32	32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
33	33	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
34	34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	55	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
56	56	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
57	57	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
58	58	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
59	59	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
60	60	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
61	61	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
62	62	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
63	63	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
64	64	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
65	65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	68	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
69	69	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
70	70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	71	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
72	72	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
73	73	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
74	74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	80	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
81	81	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
82	82	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
83	83	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
84	84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	86	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
87	87	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
88	88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	91	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
92	92	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
93	93	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
94	94	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
95	95	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
96	96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
97	97	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
98	98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	100	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1
101	101	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
102	102	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
103	103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107	107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	108	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1
109	109	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1
110	110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
111	111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113	113	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
114	114	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
115	115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116	116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117	117	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
118	118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
119	119	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
120	120	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

Lampiran 5

Data Demografi Responden

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	52	43,4%
Wanita	68	56,7%
Jumlah	120	100%

Umur

Umur	Jumlah	Persentase
21 – 30 tahun	5	4%
31 – 40 tahun	30	25%
41 – 50 tahun	50	42%
51 – 60 tahun	35	29%
Jumlah	120	100%

Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	10	8%
Diploma (D3)	4	3%
Sarjana (S1)	88	73%
Magister (S2)	18	15%
Jumlah	120	100%

Instansi/Unit Kerja

NO	NAMA SKPD	Jumlah	Persentase
1	Sekretariat DPRD	4	3,3%
2	Inspektorat	7	5,8%
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	8	6,7%
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	7	5,8%
5	Badan Pendapatan Daerah	5	4,2%
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	4,2%
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6	5,0%
8	Dinas Kesehatan	4	3,3%
9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5	4,2%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6	5,0%
11	Dinas Ketahanan Pangan	7	5,8%
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6	5,0%
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6	5,0%
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	7	5,8%
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	5,0%
16	Dinas Perikanan	4	3,3%
17	Dinas Lingkungan Hidup	4	3,3%
18	Dinas Sosial	4	3,3%
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	3,3%
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	4,2%
21	Dinas Kecamatan Tanjung Selor	4	3,3%
22	Dinas Kecamatan Bunyu	6	5,0%
Jumlah		120	100%

Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1- 5 tahun	4	3,3%
6 – 10 tahun	16	13,4%
> 10 tahun	100	83,3%
Jumlah	120	100%

Lampiran 6

Hasil Statistik Deskriptif

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAKD1	120	1,00	4,00	3,8917	,51524
SAKD2	120	1,00	4,00	3,4917	,63505
SAKD3	120	1,00	4,00	3,5033	,54976
SAKD4	120	2,00	4,00	3,7503	,46735
SAKD5	120	2,00	4,00	3,4250	,51396
SAKD6	120	1,00	4,00	3,4750	,60755
SAKD7	120	1,00	4,00	3,5500	,60599
SAKD8	120	1,00	4,00	3,4917	,67358
SAKD	120	22,00	32,00	28,5667	3,08352
Valid N (listwise)	120				

Sistem Pengendalian Internal

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI1	120	1,00	4,00	3,3667	,89733
SPI2	120	2,00	4,00	3,4500	,51613
SPI3	120	1,00	4,00	3,3917	,65203
SPI4	120	1,00	4,00	3,3750	,83074
SPI5	120	1,00	4,00	3,4750	,69759
SPI	120	13,00	20,00	17,0983	2,03868
Valid N (listwise)	120				

Sumber Daya Manusia

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SDM1	120	2,00	4,00	3,3833	,55281
SDM2	120	3,00	4,00	3,5000	,50210
SDM3	120	2,00	4,00	3,4583	,54843
SDM4	120	2,00	4,00	3,6000	,63462
SDM5	120	1,00	4,00	3,2000	,71714
SDM6	120	1,00	4,00	3,3500	,72934
SDM7	120	1,00	4,00	3,4333	,69492
SDM8	120	1,00	4,00	3,4500	,67176
SDM	120	18,00	32,00	27,2750	3,00689
Valid N (listwise)	120				

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LKPD1	120	2,00	4,00	3,6290	,54946
LKPD2	120	3,00	4,00	3,6250	,40615
LKPD3	120	2,00	4,00	3,3917	,59826
LKPD4	120	2,00	4,00	3,4250	,52919
LKPD5	120	2,00	4,00	3,4000	,56554
LKPD6	120	2,00	4,00	3,5000	,53452
LKPD7	120	2,00	4,00	3,5667	,53031
LKPD8	120	3,00	4,00	3,5333	,50098
LKPD9	120	2,00	4,00	3,4917	,53446
LKPD10	120	3,00	4,00	3,6250	,40615
LKPD11	120	2,00	4,00	3,6083	,50702
LKPD	120	31,00	44,00	39,6917	2,68462
Valid N (listwise)	120				

Lampiran 7

Hasil Uji Validitas

		Correlations								
		DA-D1	DA-D2	DA-D3	DA-D4	DA-D5	DA-D6	DA-D7	DA-D8	DA-D9
DA-D1	Pearson Correlation	1	.467**	.345**	.311*	.486**	.374**	.319**	.523**	.331**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.020	.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
DA-D2	Pearson Correlation	.467**	1	.825**	.575**	.586**	.481**	.486**	.574**	.572**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
DA-D3	Pearson Correlation	.345**	.825**	1	.593**	.605**	.593**	.574**	.572**	.606**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
DA-D4	Pearson Correlation	.311*	.575**	.593**	1	.593**	.593**	.593**	.593**	.574**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
DA-D5	Pearson Correlation	.486**	.586**	.605**	.593**	1	.523**	.523**	.523**	.523**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
DA-D6	Pearson Correlation	.374**	.481**	.593**	.593**	.523**	1	.523**	.523**	.523**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
DA-D7	Pearson Correlation	.319**	.486**	.593**	.593**	.523**	.523**	1	.523**	.523**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
DA-D8	Pearson Correlation	.523**	.574**	.572**	.574**	.523**	.523**	.523**	1	.523**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
DA-D9	Pearson Correlation	.331**	.572**	.606**	.574**	.523**	.523**	.523**	.523**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations					
		S-F1	S-F2	S-F3	S-F4	S-F5	S-F6
S-F1	Pearson Correlation	1	.425**	.277*	.007	.071	.546**
	Sig. (2-tailed)		.000	.017	.937	.440	.000
	N	120	120	120	120	120	120
S-F2	Pearson Correlation	.425**	1	.371**	.113	.148	.514**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.220	.100	.000
	N	120	120	120	120	120	120
S-F3	Pearson Correlation	.277*	.371**	1	.364**	.105	.364**
	Sig. (2-tailed)	.017	.000		.000	.254	.000
	N	120	120	120	120	120	120
S-F4	Pearson Correlation	.007	.113	.364**	1	.272*	.537**
	Sig. (2-tailed)	.937	.220	.000		.020	.000
	N	120	120	120	120	120	120
S-F5	Pearson Correlation	.071	.148	.105	.272*	1	.524**
	Sig. (2-tailed)	.440	.100	.254	.020		.000
	N	120	120	120	120	120	120
S-F6	Pearson Correlation	.546**	.514**	.364**	.537**	.524**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120	120

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6	SD7	SD8	SD9	
SD1	1									
Factor Correlation		0.87	0.81	0.80	0.78	0.81	0.78	0.78	0.81	
Eq. Error		0.13	0.19	0.20	0.22	0.19	0.22	0.22	0.19	
H		0.14	0.19	0.20	0.22	0.19	0.22	0.22	0.19	
SD2		1								
Factor Correlation			0.80	0.80	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
H			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
SD3			1							
Factor Correlation				0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error				0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
H				0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
SD4				1						
Factor Correlation					0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error					0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
H					0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
SD5					1					
Factor Correlation						0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error						0.20	0.20	0.20	0.20	
H						0.20	0.20	0.20	0.20	
SD6						1				
Factor Correlation							0.80	0.80	0.80	
Eq. Error							0.20	0.20	0.20	
H							0.20	0.20	0.20	
SD7							1			
Factor Correlation								0.80	0.80	
Eq. Error								0.20	0.20	
H								0.20	0.20	
SD8								1		
Factor Correlation									0.80	
Eq. Error									0.20	
H									0.20	
SD9									1	
Factor Correlation										0.80
Eq. Error										0.20
H										0.20

** Correlations are significant at the 0.05 level.

* Correlations are significant at the 0.10 level.

Correlations

	LD1	LD2	LD3	LD4	LD5	LD6	LD7	LD8	LD9	LD10	LD11	LD12	
LD1	1												
Factor Correlation		0.87	0.81	0.80	0.78	0.81	0.78	0.78	0.81	0.80	0.81	0.80	
Eq. Error		0.13	0.19	0.20	0.22	0.19	0.22	0.22	0.19	0.22	0.22	0.19	
H		0.14	0.19	0.20	0.22	0.19	0.22	0.22	0.19	0.22	0.22	0.19	
LD2		1											
Factor Correlation			0.80	0.80	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
H			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
LD3			1										
Factor Correlation				0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error				0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
H				0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
LD4				1									
Factor Correlation					0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error					0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
H					0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
LD5					1								
Factor Correlation						0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error						0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
H						0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
LD6						1							
Factor Correlation							0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error							0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
H							0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
LD7							1						
Factor Correlation								0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error								0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
H								0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
LD8								1					
Factor Correlation									0.80	0.80	0.80	0.80	
Eq. Error									0.20	0.20	0.20	0.20	
H									0.20	0.20	0.20	0.20	
LD9									1				
Factor Correlation										0.80	0.80	0.80	
Eq. Error										0.20	0.20	0.20	
H										0.20	0.20	0.20	
LD10										1			
Factor Correlation											0.80	0.80	
Eq. Error											0.20	0.20	
H											0.20	0.20	
LD11											1		
Factor Correlation												0.80	
Eq. Error												0.20	
H												0.20	
LD12												1	
Factor Correlation													0.80
Eq. Error													0.20
H													0.20

** Correlations are significant at the 0.05 level.

* Correlations are significant at the 0.10 level.

Lampiran 8

Hasil Uji Reliabilitas

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Total	120	100%
	Excluded ^a	0	0%
	Other	120	100%

^a Listwise deleted based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	Initial Items
.929	.91

Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Total	120	100%
	Excluded ^a	0	0%
	Other	120	100%

^a Listwise deleted based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	Initial Items
.928	.91

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Total	120	100%
	Excluded ^a	0	0%
	Other	120	100%

^a Listwise deleted based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	Initial Items
.929	.91

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Total	120	100%
	Excluded ^a	0	0%
	Other	120	100%

^a Listwise deleted based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	Initial Items
.929	.91

Lampiran 9

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38045702
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.050
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

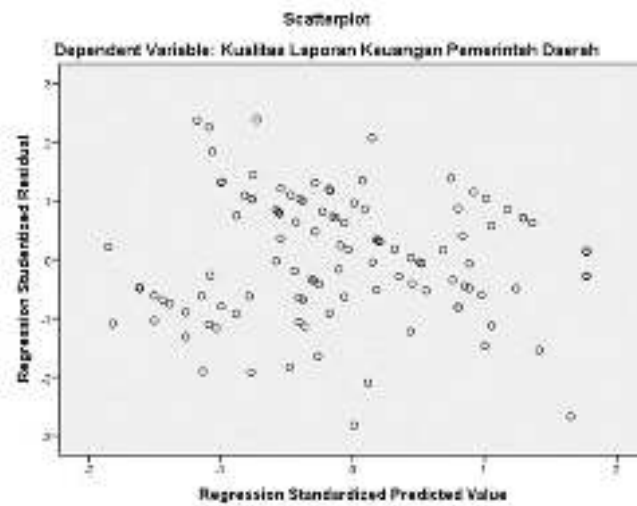
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penerapan SKAD	.865	1.156
Penerapan SPI	.754	1.326
Kompetensi SDM	.755	1.324

- a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uji Heteroskedasitas



Coefficients^a

Model	Sig.
1 (Constant)	.000
Penerapan SKAD	.499
Penerapan SPI	.329
Kompetensi SDM	.057

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Lampiran 10

Hasil Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.586	2.621		2.131	.035
Penerapan SKAD	.493	.077	.412	6.392	.000
Penerapan SPI	.577	.125	.319	4.620	.000
Kompetensi SDM	.337	.085	.275	3.986	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lampiran 11

Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.763 ^a	.583	.572	2.41104	1.811

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Penerapan SKAD, Penerapan SPI

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lampiran 12

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	941.269	3	313.756	53.974	.000 ^b
	Residual	674.323	116	5.813		
	Total	1615.592	119			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Penerapan SKAD, Penerapan SPI

Lampiran 13

Wawancara Informan

